

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Franky Butar Butar, Nabiyla Nadhir, Reza Utami Wahono, Amirah Zalfa Arindya, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Airlangga University Press, Surabaya, 2022.

Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*, UBB Press, Bangka Belitung, 2018.

Gatot Supramono, *hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineke cipta, Jakarta, 2012.

Husain Husain, Syahatah, *Perlindungan Aset Publik dalam Perspektif Hukum Islam*, Amzah, Jakarta, 2005.

Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Cet. 2 edn, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

I Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018.

Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, 2006.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Mujib, *Masail Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam*, Kalam Mulia, Jakarta, 2008.

Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007.

N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Ed. Kedua, Erlangga, Jakarta, 2004.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Tanpa Tahun.

Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010,

Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persadara, Jakarta, 2002.

Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010.

Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi*, Risalah Gusti, Surabaya, 2005.

Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009, cet. Ke-1*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Cet Kedua, Darul Fikr, Beirut, 2003.

Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral*, Robbi Press, Jakarta, 2001.

Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

## **JURNAL**

Alda Firdaus, dkk, "Strategi Penertiban kegiatan Penambangan Emas Ilegal di Parit Culum Muara Sabak Barat", *Jurnal Bangun Abdimas*, Vol.3, 2024.

Alif Arhanda Putra, "Sanksi Pidana Dalam Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Kawasan Perbatasan", *Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan*, vol. Vol 2, 2021.

Dany Andhika Karya Gita, Amin Purnawan, Djauhari, "Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining) Menurut

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia),” *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2018.
- Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti, & Dhian Indah Astanti, “Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 2016.
- Didik Try Putra, dkk, “Kebijakan Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bungo”, Ideas Publishing, 2023.
- Emilda Yofita, *Akibat Hukum Penguasaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pernerintah Pusat Terhadap Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Skripsi Pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas, Brawijaya, Malang.
- Jerico Lavian Chandra, "Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Isin", Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020.
- Kurniawan Daeli and Rakhmat Bowo Suharto, "Roles And Responsibilities Investigator In Investigation of Illegal Mining In Society Mining for Environmental Sustainability", *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 Issue 4, Desember 2018.
- Mukmin Zakie, “Kaitan Kuasa Pertambangan Dengan Hak-Hak Atas Tanah Dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria,” *Jurnal Hukum*, Vol.7, No. 13, 2000.
- Novita Sari, dkk, “Antroposentrisme pada kegiatan Eksplorasi Pertambangan Ilegal di Kawasan Hutan Provinsi Aceh”, *Journal of Political Sphere (JPS)*, Vol.4, 2023.
- Philipus M. Hadjon dkk, “Pengantar hukum Administrasi Indonesia,” Gadjah Mada Iniversity Press, Yogyakarta, 2002.

- Prianter Jaya Hariri, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Mining," Info Singkat, Vol. XIII, No.15/I/Puslit/Agustus/2021.
- Ramadhasyah Fitra Wijaya, "Implementasi Pasal 66 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Atas Usaha Pertambangan Rakyat," (Skripsi: Universitas Islam Indonesia), 2018.
- Sijabat, Jessica Claudia, "Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Sebagai Upaya Penanggulangan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Lebak," (Skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta), 2021.
- Tristia Anjami, "Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi", JOM FISIP, Vol. 4 No. 2 Oktober 2017.
- Teddy Guntara, R Mukhlis, and Widia Etorita, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Di Kota Pekanbaru," Riau University, 2014.
- Zsazsa Dordia Arinanda, Aminah, "Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan Dan Perizinan Dalam Revisi Undang-Undang Mineral Dan Batubara," Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 10, No. 1, 2021.

## **UNDANG-UNDANG**

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, Dan Persetujuan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

## **WAWANCARA**

Wawancara penulis dengan Bapak Muji, masyarakat Dukuh Wanayasa, Desa Karangmojo, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, pada tanggal 7 Juni 2025

Wawancara penulis dengan Bapak Ikun, selaku penambang tanpa izin, di Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, pada tanggal 6 Juni 2025.

Wawancara penulis dengan Bapak Yudi, selaku anggota Unit II Tipidter Satreskrim Polres Kabupaten Kebumen, Pada Tanggal 12 Juni 2025.

Wawancara penulis dengan Bapak Eko Yulianto, selaku Staf Dinas Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Kebumen, pada tanggal 5 Juni 2025.

## **INTERNET**

<https://agricola-nb.com/kondisi-pertambangan-di-indonesia.html> diakses pada tanggal 17 Maret 2025, pukul 00.32 WIB.

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-dorong-industri-pertambangan-kian-berkelanjutan> diakses pada tanggal 17 Maret 2025, pukul 00.42 WIB.

<https://regional.espos.id/ini-daerah-di-jawa-tengah-yang-berpotensi-menjadi-penghasil-emas-1703736> diakses pada tanggal 27 Mei 2025, pukul 09.06 WIB.

<https://www.metrotvnews.com/play/NgxCVjBq-polres-kebumen-bongkar-aktivitas-tambang-emas-ilegal> diakses pada tanggal 27 Mei 2025, pukul 09.20 WIB.

<https://cjp.jatengprov.go.id/profil-kabkota/17> diakses pada tanggal 7 Juni 2025, pukul 09.36 WIB.

<https://perizinan.kebumenkab.go.id/investasi/web/profil> diakses pada tanggal 7 Juni 2025, pukul 10.22 WIB.

[https://peraturan.bpk.go.id/Details/94681/perda-kab-kebumen-no-3-tahun-2018#:~:text=STATUS%20PERATURAN&text=Pasal%2018%20ayat%20\(6\)%20UUD,tahun%20pada%20tanggal%2021%20Agustus](https://peraturan.bpk.go.id/Details/94681/perda-kab-kebumen-no-3-tahun-2018#:~:text=STATUS%20PERATURAN&text=Pasal%2018%20ayat%20(6)%20UUD,tahun%20pada%20tanggal%2021%20Agustus). diakses pada tanggal 7 Juni 2025, pukul 11.05 WIB.

<https://www.kebumenekspres.com/2020/07/kebumen-kabupaten-miskin-yang-kaya.html> diakses pada tanggal 7 Juni 2025, pukul 12.15 WIB.